

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Umumnya setiap perusahaan *go public* maupun *non go public* memiliki tujuan utama yang harus dicapai yakni memaksimalkan nilai perusahaannya. Karena secara tidak langsung nilai perusahaan yang tinggi akan menunjukkan kemakmuran para pemegang saham, nilai perusahaan juga dapat dipantau melalui harga saham. Begitupun dengan harga saham yang tinggi membuat suatu peningkatan pada nilai perusahaan yang nantinya dapat membuat kepercayaan pasar terhadap kinerja perusahaan saat ini serta prospek masa depan, maka kesejahteraan para pemegang saham dapat terpenuhi. Adapun upaya dalam meningkatkan nilai perusahaan dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, yakni dengan cara menjalin kerja sama dengan pihak lain dalam membuat suatu keputusan keuangan. Pihak tersebut tidak lain *principal* dan agen, dengan adanya kerja sama yang baik maka kinerja suatu perusahaan akan baik yang nantinya dapat meningkatkan nilai perusahaan, akan tetapi apabila kerjasama tersebut tidak jalan semestinya maka akan muncul suatu konflik keagenan dimana dari masing-masing pihak cenderung mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan dengan kepentingan untuk perusahaan.

Ketika terdapat pemisahan antara *principal* dengan agen di suatu perusahaan, maka akan timbul keinginan pihak *principal* diabaikan. Kesadaran bahwa agen itu mahal sehingga ditetapkan landasan sekelompok gagasan yang bermanfaat, menurut Pearce dan Robinson (2008:47). Namun pada teori keagenan dijelaskan mengenai konsep yang menggambarkan

hubungan antara *principal* (pemberi kontrak) dan agen (penerima kontrak), *principal* menunjuk agen untuk bekerja demi kepentingan *principal*, sehingga *principal* memberikan kewenangan kepada agen untuk membuat keputusan sesuai dengan tujuan Supriyono (2016:63).

Secara umum para pemilik menginginkan kenaikan pada nilai saham, hubungan keagenan diharapkan agar dapat menyelaraskan tujuan antara *principal* dengan agen. Namun, jika diantara kedua pihak masih terdapat perbedaan dalam mencapai tujuan masing-masing maka perlu dibentuknya sebuah sistem pengendalian. Sistem pengendalian dibuat *principal* agar agen dapat membuat suatu keputusan yang sesuai diinginkan *principal*. Sistem pengendalian juga dapat digunakan *principal* dalam memonitoring kegiatan perusahaannya dengan menggunakan *Good Corporate Governance*, yang mana *Corporate Governance* ini mengacu pada teori keagenan, dalam Cooper D (2006) menyatakan *Good Corporate Governance* (GCG) terkait dengan pengambilan keputusan yang efektif, maka dibangun melalui kultur organisasi, nilai-nilai, sistem, berbagai proses, kebijakan-kebijakan serta struktur organisasi yang bertujuan untuk tercapainya bisnis yang menguntungkan, dapat efisien dan efektif dalam pengelolaan resiko dan tanggung jawab dalam memperhatikan stakeholder.

Pengukuran *corporate governance* meliputi kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, komite audit, dan dewan direksi yang bertujuan untuk lebih meningkatkan progress monitoring dan sistem pengendalian pada perusahaan, sehingga melalui proses pengawasan diharapkan kinerja perusahaan akan lebih baik dan dapat meningkatkan nilai perusahaan. Adapun prinsip

GCG digunakan untuk mengarahkan serta mengendalikan perusahaan agar dapat dicapainya suatu kesetaraan antara kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para *shareholders* dan *stakeholders*. Namun seringkali terdapat beberapa kasus penyelewengan terhadap kekuasaan yang diberikan karena adanya sifat cenderung mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan dengan kepentingan perusahaannya. Salah satu kasus yang menjerat mantan petinggi perusahaan Allianz adalah sengketa asuransi pertama yang masuk ranah pidana.

Dimana adanya perselisihan yang terjadi antara pihak bertanggung mempidanakan perusahaan asuransi tersebut. Kasus ini berawal dari laporan dua nasabah lantaran merasa dipersulit untuk mencairkan klaim asuransi pembayaran biaya rumah sakit. Allianz diduga telah menipu sejumlah nasabahnya dengan proses klaim yang tidak mungkin bisa dipenuhi oleh nasabah. Klaim nasabah akan hangus dalam waktu dua minggu kerja, akan tetapi awal perjanjian yang ditawarkan melainkan proses pencairan dana dengan mudah.(Tribunnews.com,2017).

Lain halnya dengan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI). Total pendapatan asuransi jiwa pada kuartal IV tahun 2015 turun 20,9 persen dibandingkan kuartal IV tahun 2014, dari Rp167,76 triliun menjadi Rp132,74 triliun. penurunan itu utamanya disebabkan hasil investasi asuransi jiwa yang defisit hingga Rp1,66 triliun atau menurun 104,1 persen dari 2014 yang berada di nilai Rp40,83 triliun. Adapun angka yang belum diaudit ini didapatkan dari 51 perusahaan dari 54 perusahaan asuransi jiwa anggota AAJI. Walaupun terjadi penurunan kuartal pada IV 2014, total pendapatan asuransi jiwa di kuartal sama 2015 jauh lebih baik dibandingkan

dengan kuartal ketiga 2015. Hal ini menunjukkan indikasi peningkatan kepercayaan masyarakat dan nasabah akan pentingnya mempertahankan perlindungan jangka panjang yang diberikan asuransi jiwa. Permasalahan ekonomi global itu berdampak pada pergerakan jumlah investasi industri asuransi jiwa (Suara.com, 2016).

Dari studi kasus tersebut dapat disimpulkan mengenai tata kelola perusahaan asuransi yang penerapannya belum berjalan secara efektif. Secara garis besar para pemegang saham harus menanggung biaya yang timbul akibat dari pendelegasian wewenang kepada manajemen. Biaya -biaya ini bisa berupa kerugian karena manajemen menggunakan sumber daya perusahaan cenderung pada kepentingan pribadi maupun berupa biaya pengawasan yang harus dikeluarkan perusahaan untuk mencegah terjadinya hal tersebut, sehingga terjadi tercorengnya citra perusahaan, yang nantinya berdapambak pada calon investor yang mengurungkan menanamkan modalnya.

Suatu perusahaan dapat dikatakan sehat dalam artian bebas dari skandal yang merugikan perusahaan merupakan perusahaan yang sudah me ngelola kinerja perusahaan dengan baik dan menciptakan suatu referensi positif bagi para kreditur. Kondisi ini sangat berperan dalam meminimalkan biaya modal yang ditanggung apabila perusahaan mengajukan pinjaman, selain itu dapat memperkuat kinerja keuangan juga akan membuat produk perusahaan akan menjadi lebih kompetitif, serta dapat mengangkat citra perusahaan dimata masyarakat dan juga dapat menarik minat para calon investor untuk menanamkan modalnya. Manfaat *corporate governance* sendiri untuk meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses

pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholders *Forum Corporate Governance on Indonesia* (FCGI). Begitupun dengan kualitas dewan komisaris adalah salah satu faktor utama yang dinilai oleh investor institusional sebelum mereka memutuskan untuk membeli saham perusahaan tersebut. Namun adanya komite audit juga diharapkan dapat menilai secara obyektif dapat bertanggungjawab dalam pengawasan yang dilakukan terhadap laporan keuangan, audit eksternal, dan pengawasan pengendalian intern dalam perusahaan serta menerapkan prinsip akuntansi yang berlaku.

Perubahan yang tidak teratur pada nilai perusahaan juga dapat mengurangi *agency cost* yang dipengaruhi oleh struktur kepemilikan, diantaranya kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial. Adanya kepemilikan institusional dapat meningkatkan akuntabilitas manajerial sehingga dalam pengambilan suatu keputusan manajer sangat berhati-hati. Semakin besar persentase saham yang dimiliki oleh institusional maka akan sangat difokuskan dalam proses monitoring karena dapat mengendalikan perilaku oportunistik manajer dan mengurangi biaya keagenan. Dalam penelitian Muryati dan Suardikha (2014), institusional berpengaruh dengan arah positif pada nilai perusahaan. Kepemilikan saham yang dimiliki pihak institusi mampu menjadi pengawasan yang sangat efektif dalam setiap pengambilan keputusan manajer.

Sehubungan dengan konsep keagenan, pihak yang juga dianggap penting dalam kinerja manajemen adalah *shareholders*. Dewan komisaris dibentuk karena untuk memenuhi kepentingan *shareholders* dan agar mengetahui

bahawa manajemen telah mengelola perusahaan dengan mekanisme *corporate governance* secara tepat. komisaris independen berfungsi sebagai penyeimbang dalam pengambilan keputusan oleh dewan komisaris. Komisaris independen diangkat karena pengalamannya dianggap berfungsi bagi perusahaan. Mereka bisa mengawasi komisaris internal dan mengawasi kegiatan pengelolaan perusahaan. Proporsi anggota dewan komisaris dengan nilai perusahaan didukung oleh berbagai pandangan dalam fungsi pelayanan dan kontrol yang dapat diberikan oleh dewan. Setiap perusahaan juga memiliki dewan direksi dalam bertanggungjawab atas pengawasan CEO dan manajer. Dewan direksi juga berkontribusi secara aktif dalam perencanaan dan pengawasan kegiatan operasional perusahaan, menurut Griffin dan Ebert (2006:113).

Dalam perusahaan dewan direksi perusahaan akan menentukan kebijakan dan strategi perusahaan yang diambil tersebut secara jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam penelitian Trisnantari (2010), menemukan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Diperkuat dengan penelitian Muryati dan Suardhika (2014) dewan komisaris independen memiliki pengaruh kearah positif. Hal ini dapat membuktikan bahwa dewan komisaris independen mampu menjalankan fungsi pengawasan kebijakan dan kegiatan yang dilakukan oleh dewan direksi. dan dengan adanya komisaris independen yang turut berkontribusi secara efektif dalam proses pelaporan keuangan yang berkualitas tinggi. Penelitian juga dilakukan terhadap dewan direksi Muryati dan Suardhika (2014) menyatakan dewan direksi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, dalam penelitian Susanti (2010) juga disebutkan bahwa dewan

direksi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini mampu menunjukkan adanya jumlah proporsi dewan direksi dalam perusahaan yang meningkat, maka pengelolaan perusahaan semakin baik begitupun dengan nilai perusahaan yang meningkat pula.

Komite audit juga berperan penting mengenai tanggung jawab dalam mengawasi laporan keuangan, audit eksternal dan mengontrol system pengendalian intern. pada penelitian Siallagan dan Machfoedz (2006), menunjukkan pengaruh positif komite audit terhadap nilai perusahaan. Sedangkan penelitian Muryati dan Suardhika (2014), bertolak belakang dalam hasil penelitian menunjukkan berpengaruh negative terhadap nilai perusahaan. Adanya komite audit harus dapat memastikan terselenggaranya proses pelaporan keuangan dan *corporate governance* yang efisien serta sebagai komite audit dituntut dalam menilai secara obyektif dan berintegritas tinggi. Dengan demikian seorang komite audit yang mampu berkontribusi secara aktif dalam pengelolaan perusahaan diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan yang nantinya nilai perusahaan juga ikut meningkat.

Dengan adanya *Good Corporate Governance* (GCG) dapat meminimalkan tata kelola perusahaan yang tidak berjalan sesuai dengan tujuan utama perusahaan. Pengendalian sistem GCG diharapkan mampu mengoptimalkan kinerja dari suatu perusahaan, karena dengan kinerja yang baik nilai perusahaan diasumsikan dapat meningkat sehingga investor dapat mempercayakan *return equity* kepada perusahaan. Dalam penelitian ini menggunakan perusahaan asuransi, karena usaha asuransi merupakan usaha yang menjanjikan perlindungan kepada pihak tertanggung, sekaligus menghimpun dana masyarakat. Dengan kedua peranan

tersebut perkembangan semakin meningkat, maka kebutuhan akan hadirnya perasuransian yang kuat dan dapat dipercaya. Karena dengan nilai perusahaan yang tinggi maka investor tidak akan meragukan kinerja dari perusahaan tersebut. *Corporate governance* yang dilakukan secara efektif dalam jangka panjang dapat meningkatkan kinerja perusahaan serta memberikan kemakmuran atau kekayaan para pemegang saham.

Dari pemaparan diatas dan banyaknya variasi penelitian tentang mekanisme *Good Corporate Governance* maka dalam penelitian ini akan menggunakan indikator mekanisme *Good Corporate Governance* secara lengkap meliputi Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit dan Dewan Direksi. Sebagai pengukuran indikator nilai perusahaan peneliti memproksikan *Tobin's Q Ratio*, dan sampel yang digunakan adalah perusahaan asuransi Tbk periode 2015-2017. Maka dalam penelitian ini diberi judul “ **Pengaruh Pengukuran GCG Pada Perusahaan Asuransi Tbk dalam Menentukan Nilai Perusahaan**”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah ada pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Asuransi Tbk tahun 2015-2017 ?
2. Apakah ada pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Asuransi Tbk tahun 2015-2017 ?

3. Apakah ada pengaruh Komite Audit terhadap Nilai Perusahaan Perusahaan Asuransi Tbk tahun 2015-2017 ?
4. Apakah ada pengaruh Dewan Direksi terhadap Nilai Perusahaan Perusahaan Asuransi Tbk tahun 2015-2017 ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas , maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Asuransi Tbk tahun 2015-2017.
2. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Asuransi Tbk tahun 2015-2017.
3. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh Komite Audit terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Asuransi Tbk tahun 2015-2017.
4. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh Dewan Direksi terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Asuransi Tbk tahun 2015-2017.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh pihak terutama pihak yang berhubungan langsung dalam penelitian ini. Berikut manfaat dari penelitian ini adalah:

#### **1.4.1 Manfaat Teorities**

Penelitian ini berguna untuk memberikan wawasan dan mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai pengukuran *good corporate governance* pada suatu perusahaan dalam menentukan nilai perusahaan.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. **Bagi Peneliti**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan penelitian selanjutnya dan menambah wawasan khususnya pada obyek yang diteliti.

#### 2. **Bagi Perusahaan**

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan serta sumber informasi , sehingga dapat dipakai bahan pertimbangan bagi pihak manajemen perusahaan untuk mengambil keputusan yang tepat khususnya tentang pengukuran *good corporate governance* dan nilai perusahaan.

#### 3. **Bagi Investor**

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi investor sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan sebelum melakukan investasi pada perusahaan.

#### 4. **Bagi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya**

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan literatur kepustakaan di Universitas PGRI Adi Buana Surabaya dan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian khususnya mengenai pengukuran *good corporate governance*

